



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI NASDEM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SAHRONI
2. Jabatan : BENDAHARA FRAKSI
3. NHK : 519084

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 93.354.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103.46 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.925.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 3.520.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 148.4 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 20.900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/50 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 15.950.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m²/131 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 13.130.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 3.140.500.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 2.134.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 131.8 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 13.130.000.000
12. Tanah Seluas 4.27 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,



HASIL SENDIRI Rp. 4.950.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 8.470.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.630.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 32.842.750.000

1. MOBIL, FERARI 488 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 27SRZ Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 574.750.000

3. MOBIL, FERARI 366 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000.000

4. MOBIL, BMW 1,8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.948.000.000

5. MOBIL, PORSCHE 9E3 RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
7.920.000.000

6. MOTOR, YAMAHA SPORT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
840.000.000

7. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000

8. MOBIL, MERCEDES BENZ E320 Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

9. MOBIL, TESLA X75D Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
2.800.000.000

10. MOBIL, MERCEDES BENZ 280E Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000

11. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

12. MOBIL, HONDA CIVIC LX Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

13. MOBIL, MERCEDES BENZ 420 EAGLE SEL Tahun 1986, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

14. MOBIL, TOYOTA CROWN ROYAL 3.0 AT Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

15. MOBIL, MUSTANG SEDAN Tahun 1967, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 106.194.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.921.607.954
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	251.313.357.954
III. HUTANG	Rp.	23.965.736.380
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	227.347.621.574

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.